

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR)

Ilham Fathu Ridlo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa pengaturan hukum pidana internasional mengenai perlindungan terhadap etnis muslim rohingya, dan agar dapat mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim rohingya berdasarkan hukum pidana internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa Negara Myanmar telah melanggar kewajiban internasional dalam melindungi kepentingan masyarakat internasional dimana dalam hal tersebut dapatnya pelanggaran berat atas kewajiban internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk per tanggung jawaban atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut, maka Negara mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut, Negara Myanmar dapat melakukan diplomasi. Upaya diplomasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan mediasi dimana Myanmar dapat meminta bantuan kepada PBB sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Jika diplomasi belum berhasil, maka kasus yang terjadi dapat di adili di International Criminal Court (ICC) dan dapat dijatuhi hukuman yang sesuai berdasarkan hukum internasional.

Kata Kunci : Penyelesaian Kasus, Pelanggaran HAM, Etnis Minoritas

**YURIDISS REVIEW AGAINTS THE CRIME OF GENOCIDE
IN PERSPECTIVE INTERNASTIONAL CRIMINAL LAW
(CASE STUDY OF GENOCIDE AGAINTS ETHNIC
ROHINGYA MUSLIMS IN MYANMAR**

Ilham Fathu Ridlo

Abstract

This study aimed to describe and analyze the setting of international criminal law on the protection against ethnic Rohingya Muslims, and to be aware of what to do efforts to solve the case of human rights violations by the government of Myanmar against ethnic Rohingya under international criminal law. The method used in this research is normative. As a result of this research is that the State of Myanmar has breached its international obligations in protecting the interests of the international community in that regard There is a gross violation of international obligations for the maintenance of international peace and security. As a form of accountability for human rights violations, the State has the responsibility to solve the problem, the State Myanmar to conduct diplomacy. Diplomatic efforts that can be done by using mediation where Myanmar may have recourse to the United Nations as a third party to help resolve the case. If diplomacy fails, then the case can be tried in the International Criminal Court (ICC) and can be punished by penalties consistent with international law.

Keywords: Settlement Cases, Violations of Human Rights, Ethnic Minorities